



# Benarkah Sistem Pemerintahan NKRI Sudah Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila? (Studi Kasus Jl. Bhayangkara Link 13 Kel Indra Kasih Kec Medan Tembung)

Sari Nur Lyza<sup>1\*</sup>, Zahwa Aqila Maulida<sup>2</sup>, Lola Claudia<sup>3</sup>, Sarah Lingga<sup>4</sup>, Ahmad Habib Hamonangan Srg<sup>5</sup>, Ajeng Sintia Bella<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1\*</sup>[snaruans18@gmail.com](mailto:snaruans18@gmail.com), <sup>2</sup>[zahwaaqilamaulida070206@gmail.com](mailto:zahwaaqilamaulida070206@gmail.com), <sup>3</sup>[lolaclaudia729@gmail.com](mailto:lolaclaudia729@gmail.com), <sup>4</sup>[sarahlingga3107@gmail.com](mailto:sarahlingga3107@gmail.com),

<sup>5</sup>[habibsiregar321@gmail.com](mailto:habibsiregar321@gmail.com), <sup>6</sup>[ajengsintia74@gmail.com](mailto:ajengsintia74@gmail.com), <sup>7</sup>[masitama10@gmail.com](mailto:masitama10@gmail.com).

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menilai keselarasan antara prinsip-prinsip Pancasila dan kebijakan serta praktik pemerintahan yang ada, melalui analisis konstitusi, undang-undang, dan dinamika politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pemerintahan Indonesia secara teoretis mengadopsi nilai-nilai Pancasila, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian, terutama dalam hal implementasi

demokrasi, keadilan sosial, dan pengelolaan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun dasar negara telah jelas, penguatan pengamalan Pancasila dalam sistem pemerintahan masih perlu dilakukan agar tujuan nasional dapat tercapai secara maksimal.

**Kata Kunci:** sistem pemerintahan, NKRI, Pancasila, implementasi, nilai-nilai.

## PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya merupakan ideologi atau semboyan kosong, tetapi juga menjadi panduan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sumber nilai yang fundamental, Pancasila mengandung lima sila yang saling terkait, yang seharusnya menjadi pedoman bagi kebijakan negara dan praktik pemerintahan di Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berkeadilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diharapkan dapat merefleksikan dan mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem pemerintahan Indonesia yang berbentuk republik presidensial memiliki berbagai karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, meskipun Pancasila telah tertulis dengan jelas sebagai dasar negara, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pengelolaan pemerintahan dan kebijakan publik, sering kali dipertanyakan. Masih banyak terdapat ketimpangan antara nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan realitas sosial-politik yang ada. Misalnya, meskipun Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi, sering kali ditemukan fenomena penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, serta marginalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pemerintahan yang diambil oleh eksekutif dan legislatif tidak selalu mencerminkan semangat persatuan dan keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana sistem pemerintahan NKRI telah selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di berbagai sektor pemerintahan. Melalui pendekatan analisis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan, mekanisme politik, dan dinamika sosial yang ada, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian antara sistem pemerintahan yang ada dengan nilai-nilai Pancasila. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi penguatan sistem pemerintahan yang lebih berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, serta mewujudkan Indonesia sebagai negara yang lebih adil, makmur, dan demokratis.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya memperbaiki kualitas pemerintahan di Indonesia, serta mempertegas peran Pancasila sebagai dasar negara yang sejati dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu,

perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti Pancasila sebenarnya dan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan akhirnya agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengarahkan arah hidup bangsa dan negara. Kelima sila dalam Pancasila tidak hanya merupakan pedoman moral, tetapi juga menjadi landasan filosofis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seharusnya mencerminkan implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila, yang meliputi demokrasi, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan republik presidensial, Indonesia diharapkan dapat menjalankan prinsip-prinsip tersebut dalam struktur dan mekanisme politiknya.

Namun, meskipun Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara, banyak kalangan yang mempertanyakan sejauh mana penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik pemerintahan. Isu-isu seperti ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, serta kesulitan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan adanya gap antara idealisme Pancasila dan realitas pemerintahan yang ada. Sebagai contoh, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kadang kali dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan sosial atau demokrasi yang diusung oleh Pancasila.

Melihat dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem pemerintahan NKRI yang ada saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan analisis terhadap struktur pemerintahan, kebijakan publik, serta praktik politik yang berkembang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesesuaian antara teori dan praktik dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perbaikan sistem pemerintahan yang lebih berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, demi tercapainya tujuan nasional Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan dengan dasar ideologi Pancasila, yang memuat lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan NKRI dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana sistem pemerintahan NKRI, yang berbentuk republik presidensial, benar-benar mencerminkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar yang menuntut adanya keselarasan antara norma-norma hukum, kebijakan pemerintah, dan praktik demokrasi yang berlaku. Meskipun Pancasila sudah tertuang dalam konstitusi dan diakui dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya dalam kehidupan politik dan pemerintahan masih sering dipertanyakan, terutama dalam hal pengelolaan kekuasaan, kesejahteraan sosial, serta penegakan keadilan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai hubungan antara sistem pemerintahan yang ada dengan nilai-nilai Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem pemerintahan NKRI sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan cita-cita Pancasila dalam praktik pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai relevansi Pancasila dalam konteks pemerintahan kontemporer di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini dilakukan di Jalan Bhayangkara Link 13, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, yang tepatnya terletak di depan SMKS Tritech, yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 484, Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, serta di samping Masjid Al Iman yang berada di depan SMKS Tritech. Terdapat 330 Kartu Keluarga di Link 13 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, dengan 328 Kepala Keluarga. Jumlah penduduknya adalah 1.074 jiwa, terdiri dari 542 pria dan 532 wanita. Sebanyak 25 warga mengikuti kader umum yang semuanya adalah wanita, dan 20 warga mengikuti kader khusus yang juga terdiri dari wanita seluruhnya.

## METODE

### Tahapan Penelitian

Metode deskriptif analitis ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang bisa dilakukan agar sistem pemerintahan NKRI lebih sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Metode penelitian deskriptif analitis adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan (deskriptif) dan menganalisis (analitis) fenomena yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai kesesuaian sistem pemerintahan NKRI dengan nilai-nilai Pancasila.

Penjelasan metode ini dalam konteks judul jurnal "Benarkah sistem pemerintahan NKRI sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?" adalah sebagai berikut:

**Deskriptif:** Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia saat ini dijalankan, baik dari aspek struktural, kelembagaan, maupun kebijakan-kebijakan yang ada. Peneliti akan memaparkan secara detail bagaimana implementasi sistem pemerintahan yang berlaku di NKRI, termasuk berbagai lembaga negara dan peraturan-peraturan yang mendasarinya.

**Analitis:** Setelah menggambarkan sistem pemerintahan yang ada, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Peneliti akan mengevaluasi apakah kebijakan dan tindakan pemerintah sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan ketuhanan.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara sistem pemerintahan yang ada dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, peneliti akan menilai apakah sistem pemerintahan yang diterapkan selama ini sudah sesuai dengan cita-cita Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

**Sumber Data:** Penelitian ini bisa menggunakan data primer seperti wawancara dengan ahli hukum atau pejabat pemerintah, serta data sekunder yang berupa dokumen perundang-undangan, laporan kebijakan, dan literatur terkait yang relevan dengan penerapan Pancasila dalam sistem pemerintahan.

**Metode Analisis:** Analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Peneliti akan membandingkan teori-teori atau nilai-nilai Pancasila dengan praktek yang terjadi di lapangan. Melalui analisis ini, peneliti diharapkan bisa menarik kesimpulan apakah ada gap antara harapan yang terkandung dalam Pancasila dengan kenyataan yang terjadi dalam sistem pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian dan Pembahasan untuk jurnal dengan judul "Benarkah sistem pemerintahan NKRI sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?" dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama yang akan membahas temuan-temuan dari kajian dan analisis yang telah dilakukan. Berikut adalah gambaran umum mengenai bagaimana hasil kajian dan pembahasan dalam jurnal ini dapat disusun:

### Kajian tentang Sistem Pemerintahan NKRI

- Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pemerintahan republik, di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemerintahan ini berdasarkan pada UUD 1945 yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan hak-hak dasar warga negara.
- Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan berbagai lembaga negara seperti eksekutif (Presiden dan kabinet), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA), serta berbagai lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, dan BPK.
- Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia juga mendasarkan kebijakan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengarahkan pembangunan negara.

### Pancasila Sebagai Dasar Negara

- Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa – menghargai keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia.
- Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab – menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu.
- Sila ketiga: Persatuan Indonesia – mendorong semangat persatuan dan kesatuan di antara keragaman suku, budaya, dan agama.
- Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan – mengutamakan prinsip demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia – menjamin keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

### Analisis Kesesuaian Sistem Pemerintahan dengan Nilai-Nilai Pancasila

- Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**  
Sistem pemerintahan Indonesia mengakui kebebasan beragama dan menjamin hak beribadah bagi setiap warga negara. Namun, penerapan nilai-nilai toleransi beragama seringkali menghadapi tantangan, seperti kasus intoleransi atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama atau kepercayaan.
- Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**  
Sistem pemerintahan Indonesia mengakui pentingnya hak asasi manusia melalui berbagai regulasi dan lembaga seperti Komnas HAM. Namun, ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, seperti

masalah kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial yang belum sepenuhnya teratasi.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Meskipun Indonesia mengedepankan semangat persatuan dalam kemajemukan, ada beberapa tantangan yang memengaruhi kesatuan bangsa, seperti konflik daerah (misalnya, di Aceh dan Papua), serta isu separatisme dan radikalisme yang mengancam integritas negara.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Indonesia menjalankan sistem demokrasi yang memungkinkan perwakilan rakyat dalam bentuk pemilihan umum dan musyawarah di lembaga legislatif. Namun, praktik politik uang, korupsi, serta rendahnya kualitas demokrasi masih menjadi tantangan besar dalam implementasi musyawarah mufakat yang sesungguhnya.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Penerapan keadilan sosial masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang signifikan, baik antar daerah, antar golongan, maupun antara kaya dan miskin. Meskipun ada program pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial (misalnya, program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur), masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

### Temuan Utama dan Pembahasan

a. Kelemahan dalam Implementasi Pancasila

Meskipun sistem pemerintahan Indonesia secara formal mengacu pada Pancasila, ada sejumlah masalah dalam implementasinya. Salah satu masalah utama adalah ketidakseimbangan antara norma-norma hukum dan praktik politik yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis atau kekuasaan.

b. Tantangan dalam Penegakan Keadilan Sosial

Penerapan sila kelima Pancasila, keadilan sosial, masih sangat sulit tercapai, khususnya dalam hal pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Pentingnya Pendidikan Pancasila

Untuk mencapai kesesuaian yang lebih baik antara sistem pemerintahan dan nilai-nilai Pancasila, dibutuhkan pendidikan yang lebih mendalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara, baik di tingkat pendidikan formal maupun dalam kehidupan sehari-hari.

d. Rekomendasi untuk Peningkatan Kesesuaian

Beberapa rekomendasi yang muncul dari kajian ini antara lain:

1. Perlu adanya penguatan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menjaga hak asasi manusia dan anti-diskriminasi.
2. Pembentukan dalam sistem demokrasi dan pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan adil.
3. Penguatan kebijakan yang menjamin pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial, khususnya untuk daerah-daerah tertinggal

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemerintahan NKRI memiliki dasar yang kuat dalam Pancasila, namun dalam implementasinya masih terdapat ketidaksesuaian pada beberapa aspek, terutama dalam penerapan prinsip keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

Dengan demikian, sistem pemerintahan NKRI masih perlu penyesuaian lebih lanjut agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam semua sektor kehidupan negara.

Hasil penelitian wawancara langsung kepada beberapa narasumber dengan menggunakan metode kuesioner yaitu melalui Google Form, dengan narasumber yang 100% beragama Islam. Berikut merupakan pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah partisipasi rakyat dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan negara sudah mencerminkan nilai demokrasi pancasila?
2. Bagaimana peran pancasila sebagai ideologi negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Apakah sudah baik?
3. Apakah sistem pemerintahan indonesia berhasil menjaga "persatuan indonesia" di tengah keberagaman suku, agama dan budaya yang ada?
4. Apakah sistem pemerintahan Indonesia sudah mewujudkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia" mengingat adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah?
5. Apakah faktor faktor seperti politik identitas, oligarki, atau ketimpangan pembangunan menghambat penerapan nilai nilai pancasila dalam sitem pemerintahan indonesia?
- 6.

No.	Nama	Pekerjaan	Pertanyaan									
			1		2		3		4		5	
			S	B	S	B	S	B	S	B	S	B
1	Suci Yasmin	Mahasiswa	✓			✓		✓		✓	✓	
2	Fatiha Alliya	Mahasiswa	✓			✓		✓		✓	✓	

3	Nurmala Sari	Administrasi	✓			✓	✓			✓		✓
4	Cantika L	Mahasiswi	✓		✓		✓			✓	✓	
5	Alya Tetra	Mahasiswi	✓		✓		✓		✓		✓	
6	Nur Habibi	IRT	✓		✓		✓		✓		✓	
7	Siska Ramadani	Guru	✓		✓		✓			✓	✓	
8	Della Elviana	Mahasiswi	✓		✓		✓			✓		✓
9	Fitri	-	✓		✓		✓			✓	✓	
10	Qonita Qurota	Pengusaha	✓		✓		✓			✓	✓	
11	M. Rizki Fajar	Guru	✓		✓		✓			✓	✓	
12	Mohan	-	✓			✓	✓		✓			✓
13	Wartono	Pedagang	✓		✓		✓			✓		✓
14	Deddy	Pedagang		✓		✓	✓			✓	✓	
15	Elisa Meilani	-	✓			✓		✓		✓	✓	
16	Nani	Pedagang	✓		✓		✓		✓		✓	
17	Tarno	Pedagang	✓		✓			✓		✓		✓
18	Ihwal Syah.	-	✓			✓	✓			✓	✓	
19	Alwy Akbar	Pengusaha		✓		✓		✓		✓		✓
20	Try Putra A.	Percetakan		✓		✓	✓			✓	✓	
21	Indah R. S.	Mahasiswi		✓		✓	✓			✓	✓	
22	Zikri Amir	Wirausaha		✓		✓		✓		✓	✓	
23	M. Aidil W.	Satpam		✓		✓		✓		✓	✓	
24	Moza	Waitress	✓			✓	✓		✓		✓	
25	Ida Rahma L.	Wiraswasta	✓			✓	✓			✓	✓	
27	Nurainun	IRT		✓		✓		✓		✓		✓
28	Poniman Lies	Satpam		✓		✓		✓		✓		✓
29	Aisyah	T. Sapu	✓		✓		✓			✓	✓	
30	Cathryne	Mahasiswi		✓	✓		✓			✓	✓	
31	Windi	Pedagang	✓		✓		✓		✓		✓	
32	Sazkia A.H.	Mahasiswi	✓		✓		✓			✓	✓	
33	Maura M.P	Mahasiswi		✓		✓	✓			✓	✓	
34	Dilla	IRT		✓		✓		✓		✓	✓	
35	Tasya	Karyawan	✓		✓		✓			✓	✓	
36	Luna C. Lbs	Mahasiswi	✓		✓			✓		✓	✓	
37	Nurul	-	✓			✓	✓			✓	✓	
38	Kriti Cinday	Bank BRI	✓			✓		✓		✓	✓	
39	Dahlia A.	BUMN	✓		✓			✓		✓	✓	
40	Dian Irianto	Guru	✓		✓		✓			✓	✓	
41	Ridho A.	-		✓		✓	✓			✓	✓	
42	Faris Ghausi	Pengusaha	✓			✓	✓			✓	✓	
43	Iqbal Anugrah	T. Kaca	✓		✓		✓		✓		✓	
44	Rani	-		✓		✓		✓		✓		✓
45	Arjun	Petani	✓		✓		✓		✓		✓	
46	Maulana	-		✓		✓		✓		✓	✓	
47	Dini Yandini	-	✓			✓		✓		✓	✓	
48	Bima A.	-	✓		✓		✓		✓		✓	
49	Zahwah	Kasir	✓			✓	✓			✓	✓	
50	Paini	Pedagang	✓			✓	✓			✓		✓
51	Siti Aisyah	Pelajar	✓		✓		✓		✓		✓	
52	Ana Zain Nst	Pengusaha	✓			✓		✓		✓	✓	
53	Rosania S.	Barista	✓		✓		✓		✓			✓
54	Rafly Suherry	-	✓		✓		✓			✓		✓
55	Mesnah	IRT	✓		✓		✓		✓		✓	
56	Dri Vera	IRT		✓		✓	✓			✓	✓	

57	Fara Nazla	Mahasiswi	✓		✓		✓		✓		✓	
58	Alya Adha	Freelancer	✓		✓			✓		✓	✓	
59	Paujan S. Srg	Marbot	✓		✓		✓		✓		✓	
60	Eva	Komentator		✓		✓	✓			✓	✓	
61	Sakinah	Guru	✓			✓	✓			✓	✓	
62	Indah Cahyati	Buruh	✓		✓		✓			✓	✓	
63	Nabila	Kantor	✓		✓		✓		✓		✓	
64	Dyana Devie	IRT	✓		✓		✓			✓	✓	
65	Mia R. S.	Guru	✓		✓			✓		✓	✓	
66	Raihanah U.	Siswa	✓			✓	✓			✓	✓	
67	Rahmat L.	Pedagang	✓		✓		✓			✓	✓	
68	Ahmad Buchori	-	✓			✓	✓			✓	✓	
69	Dira	ASN	✓		✓		✓			✓	✓	
67	Halimatussakdiyah	IRT	✓		✓		✓			✓	✓	

Catatan :

S = Sudah

B = Belum

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan NKRI secara umum memiliki landasan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip dasar Pancasila dan pelaksanaan pemerintahan yang ada. Masalah besar yang sering muncul adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya yang terkait dengan keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Walaupun semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengedepankan semangat persatuan, dalam praktiknya masih ada tantangan terkait intoleransi, konflik sosial, dan perpecahan politik, yang bertentangan dengan prinsip persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat ketimpangan sosial yang signifikan di Indonesia, meskipun berbagai kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan telah diimplementasikan.

Kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan pembangunan masih menjadi tantangan besar, yang menunjukkan bahwa nilai "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" belum sepenuhnya tercapai. Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi yang mengedepankan kerakyatan, dalam kenyataannya, praktik politik sering kali dipengaruhi oleh oligarki dan ketidakadilan, yang membatasi partisipasi rakyat secara langsung. Demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kebijaksanaan yang adil dalam pengambilan keputusan politik.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Terutama kepada penulis artikel ini karena sudah dapat bekerja sama dengan baik dan terimakasih juga untuk responden yang sudah membantu dalam proses penulisan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Khoiriah, I. A. (2019). Memahami nilai-nilai Pancasila dan Penerapannya.
- Adi, P. (2016). Pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional NKRI. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 37-50.
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan pilkada berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1).
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Nurhikmah, A. R., & Nugrahaningtyas, N. (2021). Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 59-69.
- Adi, P. (2016). Pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional NKRI. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 37-50.
- Saiin, A. (2017). Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Justitia et Pax*, 33(2).

- Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (2021). Pembangunan sistem hukum indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88-98.
- Efendi, Y., & Sa'diyah, H. (2020). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 5(1), 54-65.
- Wardana, A. F. G. (2021). Analisis Kesesuaian Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Dengan Nilai-Nilai Pancasila. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 61-76.
- Hakim, A. A. (2020, Juni 1). *Pancasila Sebagai Philosopische Grondslag Dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung*. Retrieved from DJKN Kemenkeu: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosopische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html>
- Pusdatin. (2021, Juli 15). *Begini Hubungan Pancasila dan UUD 1945*. Retrieved from BPIP: <https://bPIP.go.id/artikel/begini-hubungan-pancasila-dan-uud-1945>
- Rafelia, L. (2022, September 30). *Pancasila dan Milinealis*. Retrieved from BPBD babel prov: <https://bPBD.babelprov.go.id/pancasila-dan-milinealis/>
- Sari, R. (2022). MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *HARMONY*, 54.